

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kota Semarang Tahun 2015-2025
- Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 556/407 Tahun 2012
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah
- Abdul Mughis. (2019). *BRT Jangkau Desa Wisata Kandri dan Goa Kreo*. Jatengtoday.Com. <https://jatengtoday.com/brt-jangkau-desa-wisata-kandri-dan-go-kreo-26113>
- Agustino, L. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*.
- Ahsani, R. D. P., Suyaningsih, O., Ma'rifah, N., & Aerani, E. (2018). Penerapan konsep community based tourism (CBT) di desa wisata candirejo borobudur mewujudkan kemandirian desa. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2). <https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i2.2270>
- Amalyah, R., Hamid, D., & Hakim, L. (2016). Peran Stakeholder Pariwisata Dalam Pengembangan Pulau Samalona Sebagai Destinasi Wisata Bahari. *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 37(1), 158–163.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Abd, R. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*.
- Creswell. (2010). *RESEARCH Design Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed*. 0274.
- Elista, A., Kismartini, & Rahman, A. Z. (2020). Peran Stakeholder dalam Program Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 363–377.
- Ervianti, M. (2018). Faktor-Faktor Yang Menghambat Collaborative Governance Dalam Implementasi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru. *Jom Fisip*, 5, 1–13. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/20434>
- Handayani, F., & Warsono, H. (2017). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang. *Journal*

*of Public Policy and Management UNDIP*, 6(1), 1–13.

- Hari Nalayani, N. N. A. (2016). Evaluasi Dan Strategi Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Badung, Bali. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 2(1993), 189–198. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2016.v02.i02.p12>
- Hogwood dan Gunn, 1990 Edi Suharto (2007 : 4). (n.d.). *IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Pada Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara)*.
- Hunter, L., McGregor, A., MacInnes, J., & Sproull, A. (1993). (belangrijk voor discussie slachtoffer vs vormgever) The ‘Flexible Firm’: Strategy and Segmentation. *British Journal of Industrial Relations*, 31(3), 383–407.
- Huxham, C., Vangen, S., Huxham, C., & Eden, C. (2000). The Challenge of Collaborative Governance. *Public Management: An International Journal of Research and Theory*, 2(3), 337–358. <https://doi.org/10.1080/14719030000000021>
- Indriani, N. K., Yasintha, P. N., Putu, N., Prabawati, A., & Universitasdudayana, F. I. (2021). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA BELANJA PASAR*. 1–11.
- Keban, Y. T. (2014). *ENAM DIMENSI STRATEGIS ADMINISTRASI PUBLIK* (3rd ed.).
- Kurniasih, D.-. (2017). Model Penguatan Kelembagaan Pada Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (Slbm) Di Kabupaten Banyumas (Suatu Pendekatan Collaborative Governance). *Sosiohumaniora*, 19(1), 1–7. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i1.7888>
- LANTAEDA, S. B., LENGKONG, F. D. J., & RURU, J. M. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).
- Matthoriq, Zauhar, S., & Hermawan, R. (2021). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP ) Collaborative Governance dalam Tata Kelola Pariwisata-Desa ( Studi Pariwisata-Desa “Bumiaji agrotourism” di Kota Batu. *JIAP Vol 7, No 1, Pp 20-29, 2021*, 7(1), 20–29.
- Melyanti, I. M. (2014). Kebijakan dan Manajemen Publik Pola Kemitraan Pemerintah, Civil Society, dan Swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(1), 1–9. [www.paskomnas.com](http://www.paskomnas.com)
- Meray, J. G., Takumansang, E. D., Universitas, K., Ratulangi, S., Pengajar, S., Arsitektur, J., Sam, U., Manado, R., Berkelanjutan, P., Kakas, K., Minahasa, K., & Pesona, Y. (2016). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Pariwisata Pantai Mahembang Kecamatan Kakas. *Spasial*, 3(3), 47–55.
- Napitupulu, F. S., Subowo, A., & Afrizal, T. (2020). *Kelompok Nelayan Di Kelurahan*

*Tanjung Mas , Kecamatan Semarang Utara , Kota Semarang the Role of Stakeholders S in Poverty Alleviation of Fisherman Groups in Tanjung Mas Urban Village , North Semarang Sub-District , Semarang City.*

- Nugroho, H. N., Zauhar, S., & Suaryadi. (2014). Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pembangunan Dan Alam Lestari.*, 5(1), 12–22.  
<https://jpal.ub.ac.id/index.php/jpal/article/view/147>
- Oktavia, S., & Saharuddin. (2015). Hubungan Peran Stakeholders Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Agropolitan Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(3), 231–246.  
<https://doi.org/10.22500/sodality.v1i3.9407>
- Pasolong, H. (2008). *Teori Administrasi Publik*.
- Paul B. Horton, C. L. H. (1999). *Sosiologi*.
- Pebriyanti, E., Rinnanik, & Buchori. (2020). *OBJEK WISATA DAN PELAKU USAHA (Dampak Pengembangan Objek Wisata terhadap Ekonomi Masyarakat)*.
- Putri, N. I., & Yuniningsih, T. (2019). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(4), 40–50.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/24790>
- Salouw, E. (2021). Implementasi Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Pariwisata (Studi Kasus Pada Kepulauan Banda). *Jurnal Pariwisata Pesona*, 6(1), 81–94.  
<https://doi.org/10.26905/jpp.v6i1.5543>
- Salsabila, T. A., & Santoso, R. S. (2016). *ANALISIS STAKEHOLDERS (AKTOR KEBIJAKAN) DALAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA CANDI GEDONGSONGO DI KABUPATEN SEMARANG*. 1–15.
- Sujendra, M. A. B. B., & Ip, S. (2019). *PARIWISATA AIR TERJUN BERAWAN DI KABUPATEN BENGKAYANG Oleh : JANUARDI DEKI E1031151031 OF BERAWAN WATERFALL TOURISM IN BENGKAYANG REGENCY A . PENDAHULUAN* Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas layanan yang dis. 1–17.
- Sulastri. (2017). *PERAN STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA KEBUN RAYA MASSENREMPULU ENREKANG*.
- Tilano, F. A., & Suwitri, S. (2019). Collaborative Governance dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 8(3), 1–18.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/24039>
- Wati, M. S. (2016). Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Kota

Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8.

Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*.

Yosevita, L. (2015). Implementasi Peran Stake Holder dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Manusela (TNM) di Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Agroforestri*, X(1), 21–30.

Yuliati, E., & Suwandono, D. (2016). *Arahan Konsep dan Strategi Pengembangan Kawasan Desa Wisata Nongkosawit Sebagai Destinasi Wisata Kota Semarang*. 97–100.